

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Ashiilah Ariij Syahni
NPP : 31.0188

*Asdaf Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : ashiilah20syahni@yahoo.com

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of education infrastructure development planning in Tebo Regency caused by dapodik data not being input according to the provisions by school operators, and school buildings that stand on private land which results in the development of education infrastructure development in Tebo Regency not being maximized. This requires special action from the government to find solutions to development planning problems in the education sector in Tebo District, Jambi Province. **Objectives:** The purpose of this study was to determine and analyze the planning of educational infrastructure development in Tebo Regency, Jambi Province, to determine and analyze the supporting and inhibiting factors of educational infrastructure development planning in Tebo Regency, Jambi Province, to determine and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of educational infrastructure development planning in Tebo Regency, Jambi Province. **Methods:** The research method used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches, the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results/Findings :** The dapodik data inputted by the operator is not in accordance with the provisions of data filling owned by the central government so that it hampers the progress of incoming data and has an impact on the education Budget Allocation Fund (DAK) obtained by the local government to carry out infrastructure development. **Conclusion:** The Tebo District Government through the Tebo District Education and Culture Office overcomes dapodik data input problems that hamper development planning by providing training by professional experts from the ministry's facilitator team.

Keywords: Planning, Infrastructure, Dapodik Data.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo yang disebabkan oleh data dapodik tidak diinput sesuai ketentuan oleh tenaga operator sekolah, dan bangunan sekolah yang berdiri diatas lahan milik swasta yang mengakibatkan perkembangan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo menjadi tidak maksimal. Hal ini membutuhkan tindakan khusus dari pemerintah untuk mencari penyelesaian masalah perencanaan pembangunan pada bidang pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. **Tujuan :** Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis upaya – upaya mengatasi faktor penghambat perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. **Metode :** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Data dapodik yang diinput oleh tenaga operator tidak sesuai dengan ketentuan pengisian data yang dimiliki pemerintah pusat sehingga menghambat *progress* data yang masuk dan berdampak kepada Dana Alokasi Anggaran (DAK) pendidikan yang didapatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur. **Kesimpulan :** Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo mengatasi masalah input data dapodik yang menghambat perencanaan pembangunan dengan memberikan pelatihan oleh ahli profesional dari tim fasilitator kementerian.

Kata Kunci : Perencanaan, Infrastruktur, Data Dapodik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari peran penting kualitas sumber daya manusia dalam mengelola negara dan sumber daya alam yang dimiliki. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan proses pembelajaran yang baik melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang hampir sama pentingnya dengan investasi modal. Pendidikan tidak hanya berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem pendidikan Negara Indonesia berada pada peringkat ke – 54 dari total 78 negara. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Sementara itu HDI Indonesia berada di posisi 107 dari 189 negara dengan nilai 0,718 (kategori tinggi). Posisi HDI Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Indonesia dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*), turun dari berpendapatan menengah atas (*upper middle income*) akibat pandemi Covid-19.

Pembangunan daerah yang berhasil tidak terlepas dari perencanaan yang matang oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan proses perbaikan kehidupan menuju lebih baik bagi seluruh lapisan

masyarakat. Perencanaan pembangunan dimulai dari tahapan – tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan beragam aspek didalamnya untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Pemerintah daerah berperan sebagai perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan harus sesuai dengan fungsi, visi, misi, sasaran, dan tujuan yang diterapkan.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kembali penurunan pendapatan yang terjadi akibat covid-19 maka pemerintah membentuk Visi Indonesia Tahun 2045 adalah Indonesia Maju. Pada saat itu, Indonesia diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi ke-4 terbesar di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu pilar yang harus dicapai adalah terciptanya SDM yang unggul. Menyadari hal itu, pemerintah sejak 2019 menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus utama APBN untuk pembangunan SDM.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Masih berkaitan dengan letak geografis, pembangunan gedung sekolah juga terhambat karena berada di kawasan hutan. Gedung sekolah ini murni berasal dari hasil swadaya masyarakat setempat karena tidak bisa mendapatkan anggaran pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Tebo karena masuk ke dalam wilayah perhutanan milik PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABTP). Agar dapat dianggarkan oleh Pemkab maka pemerintah pusat harus melepas fasilitas umum tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan kedua tabel Data Dapodik diatas, dapat dilihat dengan jelas jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Tebo untuk menghitung perbandingan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah. Untuk mendapatkan data yang akurat, perangkat tenaga pendidik harus mengisi data dapodik dengan benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan agar dapat di evaluasi oleh pemerintah daerah terkait fasilitas pendidikan yang harus segera diperbaiki untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fakta yang terjadi dilapangan menjadi salah satu alasan yang menghambat perencanaan pembangunan menjadi tidak efektif. Padahal pengisian data yang akurat sangat diperlukan agar pimpinan dapat menentukan arah pembangunan selanjutnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan. Penelitian Cahyadi Kurniawan (2020) berjudul Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah (Studi pada Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018), menemukan bahwa Penyebab tidak tereailisasinya pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air bersih dan listrik di Desa Plampang dikarenakan adanya peristiwa gempa bumi pada Tahun 2018.(Kurniawan, 2020). Penelitian Asmaul Husna (2020) berjudul Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi (Studi pada Kabupaten Soppeng), menemukan bahwa Variabel pembangunan infrastruktur sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap investasi.(Husna, 2020). Penelitian Hernawan (2021) berjudul Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif *Siyasah Idariyah* (Studi pada Kota Parepare), menemukan bahwa skala prioritas, para perencana dan pengambil kebijakan, akan menghadapi kesulitan dalam perencanaan mengingat jumlah orang yang terlibat terlalu banyak sementara jumlah sumber daya (kompetensi) sangat sedikit.(Hernawan, 2021). Penelitian Deni Muhammad Wahyu (2023), berjudul Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (Studi pada Kabupaten Kepulauan Meranti), menemukan bahwa implementasi dan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum secara optimal memberikan kesejahteraan pada masyarakat

Kabupaten Kepulauan Meranti. Perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan hingga pengawasan dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. (Wahyu, 2023). Penelitian Mariyatul Kubtiyah Ritonga (2017), berjudul Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi Sumatera Utara), menemukan bahwa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara dalam menghadapi krisis global sangatlah tepat dan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. (Putri Ramadhani et al., 2021). Penelitian Yusijar (2023), berjudul Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Indonesia (Studi pada Negara Indonesia), menemukan bahwa Infrastruktur sebagai sarana dan prasarana umum yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat ketimpangan. Dalam penelitian ini, infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan yang terjadi di Indonesia. (Yuslijar, 2003). Penelitian Jimmy Herman (2014), berjudul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah di Kecamatan Sekolah Darat (Studi pada Kabupaten Kutai Barat), menemukan bahwa keberadaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat secara implementatif cukup efektif dan mampu menambah beberapa sarana dan prasarana, bukan hanya prasarana jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, tetapi juga menambah prasarana ekonomi. (Herman, 2014). Penelitian Sarsena (2023), berjudul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat (Studi pada Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu), menemukan bahwa keberadaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sekolah Darat Kabupaten Kutai Barat secara implementatif cukup efektif dan mampu menambah beberapa sarana dan prasarana, bukan hanya prasarana jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, tetapi juga menambah prasarana ekonomi. (Sarsena, 2023). Penelitian Noviandi Killa (2023), berjudul Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, menemukan bahwa Tahap perencanaan pembangunan di Tinum Baru dimulai melalui musyawarah paling bawah hingga sampai Musyawarah Desa (Musdes), akan memberikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat salah satunya pembangunan infrastruktur sehingga Kepala Dusun, Ketua RT mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat musyawarah tingkat desa. Tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan perencanaan pembangunan dengan tinjauan kelengkapan untuk mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan atas usulan warga untuk memprioritaskan pembangunan penunjang yang dibutuhkan masyarakat, seperti akses dalam desa maupun di luar desa. (Killa, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan menggunakan teori sistem perencanaan pembangunan daerah menurut F. Simangunsong dalam bukunya "Perencanaan Pembangunan Daerah" (2022:63) berdasarkan 10 dimensi, yaitu : Transparan, Responsif, Efisien, Efektif, Akuntabel, Partisipatif, Terukur, Berkeadilan, Berwawasan lingkungan, dan Berkeadilan. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi Kurniawan, Asmaul Husna, Hernawan, Denny Muhammad Wahyu, Mariyatul Kubtiyah Ritonga, Novitasari Putri Ramadhani, Yusijar, Jimmy Herman, Sarsena, Noviandi Killa,

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, untuk mengetahui dan

menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dan mengetahui dan Menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif karena peneliti ingin mengetahui serta memperoleh secara jelas bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Menurut (Creswell, 2013) menjelaskan bahwa : Pendekatan Penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data”. Sehingga pendekatan penelitian merupakan langkah awal untuk memulai sebuah penelitian melalui rencana dan prosedur yang baik agar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapatkan data secara tepat untuk dianalisis. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dikarenakan wajib merujuk terhadap temuan yang didapati di lapangan, dengan demikian mau ataupun tidak mau peneliti kualitatif wajib memenuhi kelengkapan diri dengan peralatan rekam ataupun hal yang sejenis. (Simangunsong, 2017). Penelitian kualitatif merupakan penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 informan, yakni Bupati Tebo, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo, Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Badan Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, Kabid Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, Kabid Prasarana dan Sarana Wilayah, Kabid Pendidikan Dasar, Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Ketua MKKS Tingkat SMP, Ketua MKKS Tingkat SD, Manajer Operasional PT. Bukti Ala Tiga Puluh (ABT), dan Ketua Komite SMPN 1 Kabupaten Tebo. Adapun analisisnya menggunakan teori sistem perencanaan pembangunan daerah menurut F. Simangunsong dalam bukunya “Perencanaan Pembangunan Daerah“ (Simangunsong, 2022) berdasarkan 10 dimensi, yaitu : Transparan, Responsif, Efisien, Efektif, Akuntabel, Partisipasif, Terukur, Berkeadilan, Berwawasan lingkungan, dan Berkeadilan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi menggunakan teori sistem perencanaan pembangunan daerah menurut F. Simangunsong dalam bukunya “Perencanaan Pembangunan Daerah“ berdasarkan 10 dimensi, yaitu : Transparan, Responsif, Efisien, Efektif, Akuntabel, Partisipasif, Terukur, Berkeadilan, Berwawasan lingkungan, dan Berkeadilan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Kondisi awal merupakan dimana suatu kondisi Situasi awal antara pemangku kepentingan dan antara lembaga berangkat dari kondisi yang berbeda dalam kondisi awal ini. Dalam kondisi awal pada teori ini menjelaskan berupa sumber daya dan pengetahuan, insentif dan konflik yang ada. Tahap ini mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi awal dari perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi menggambarkan bahwa masih terdapat kurangnya kemampuan yang dimiliki tenaga operator dalam mengolah data dapodik dan koordinasi dengan pihak swasta terkait bangunan sekolah didalamnya.

3.2. Institusional Design (Desain Institusional)

Desain institusional dengan memperhatikan protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk legitimasi prosedural dan proses kolaboratif. Penyelenggaraannya harus bersifat terbuka dan inklusif agar setiap kelompok merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Desain institusional yang ada berupa partisipasi forum, aturan, transparansi dan forum terbatas. bahwasannya masih ditemukan kurang optimalnya partisipasi yang berlangsung dalam penyelesaian masalah perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo walaupun memang sudah beberapa partisipasi kolaborasi antara Dinas dengan masyarakat dalam mengelolanya, akan tetapi sudah adanya forum terbatas yang ada mulai dari sektor masyarakat maupun pihak swasta yang menjadi forum terbatas dalam dari pengelolaan sampah pada Kota Bekasi.

3.3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

Aspek kepemimpinan merupakan merupakan unsur penting dalam mengantar pemangku kepentingan yang berkolaborasi kedalam perundingan dan negosiasi untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menyatukan mereka dalam semangat kolaboratif. Pada sub tema ini menjelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif yang ada di Kabupaten Tebo dalam menyelesaikan perencanaan pembangunan sudah paham dan saling menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan kepada tiap pemangku kepentingan. Diantara lain memiliki sifat pemahaman memahami konteks, memiliki kompetensi Teknis rasional dan memiliki karakteristik pribadi yang baik.

3.4. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi merupakan inti dari model kolaborasi. Proses kolaborasi digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi dilaksanakan. Proses kolaborasi adalah proses yang membahas mengenai dialog yang dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendapatkan keputusan bersama yang 6 disepakati. Kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar mulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Dari hasil pengamatan menjelaskan sudah ada dialog tatap muka yang dilakukan terhadap Pemda Tebo dengan masyarakat dan pihak swasta dan sering menjalani kolaborasi dalam bentuk penerapan menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran dan dalam pelaksanaan kolaborasi masing-masing dari pemegang kepentingan antara Pemda dengan masyarakat dan pihak swasta telah membangun kepercayaan dan harapannya dapat berjalan lebih baik dalam hal membangun suatu hubungan. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan sudah paham akan pemahaman dalam menjalani suatu kolaborasi dibutuhkan pemahaman bersama guna terwujudnya suatu tujuan bersama. pelaksanaan pada hasil sementara sudah ada walaupun belum jangkauan besar akan tetapi dalam setiap pelaksanaan pasti akan menjadi evaluasi yang menjadikan hasil dari berikutnya lebih baik dan harapannya warga dapat partisipasi dalam penanganan jika ada sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki URC supaya penanganannya dapat cepat dan tepat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi belum berjalan dengan tepat sasaran dan masih belum sesuai dengan pembangunan infrastruktur yang diharapkan. Perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang sebagai *Leading Sector* Bersama OPD Teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang belum dapat terpenuhi sempurna karena pengisian media penyampaian informasi yakni, Data Dapodik tidak diinput sesuai ketentuan maka berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapat oleh Pemda dari Pemerintah Pusat. Serta koordinasi antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait penyelesaian bangunan sekolah diatas lahan milik swasta belum menemui titik terang jalan keluar penyelesaiannya karena dengan adanya penyerahan lahan kepada Pemda maka pembangunan sekolah tersebut dapat dianggarkan dalam dana APBD Kabupaten Tebo.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Tebo sudah berjalan namun belum mencapai tujuan utama dan belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat kurangnya kordinasi antar pihak, kurang optimalnya perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan karena faktor kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki. Masih ditemukan kurang optimalnya dalam proses koordinasi pihak pemerintah pusat dan daerah dengan pihak swasta. Faktor pendukung dan faktor penghambat proses perencanaan berasal dari internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah dengan memberikan pelatihan kepada tenaga operator oleh fasilitator Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan melakukan audiensi kepada Kementerian Kehutanan terkait pelepasan lahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tebo

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Tebo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam hal ini Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian penulis yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Herman, J. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan pembangunan daeah kota kutai barat. *Jurnal Paradigma*, 3(3), 282–290. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/396%0Ahttps://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/396/356>
- Hernawan. (2021). *Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota*

Parepare Perspektif Siyasa Idariyah.

- Husna, A. (2020). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi*. https://www.researchgate.net/publication/373474798_PENGARUH_PEMBANGUNAN_INFRASTRUKTUR_TERHADAP_INVESTASI_DI_KABUPATEN_SOPPENG_PR_OPOSAL_OLEH_ASMAUL_HUSNA_NIM_105711105616
- Killa, N. (2023). *Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa*.
- Kurniawan, C. (2020). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah. *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Putri Ramadhani, N., Heru Akhmadi, M., Manajemen Keuangan, J., Keuangan Negara STAN, P., Jl Bintaro Utama Sektor, I. V, Jaya, B., & Selatan, T. (2021). Evaluasi Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di PKN STAN Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(2), 153–171. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7393>
- Ritonga, M. K. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 7(1), 79–82.
- Sarsena. (2023). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Penerbit Alfabeta.
- Simangunsong, F. (2022). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Cetakan Pe)*. CV. Sketsa Media.
- Wahyu, D. M. (2023). *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Yuslijar. (2003). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Indonesia*.

